BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan vihara merupakan ruang publik religius yang memiliki peran sentral dalam kehidupan spiritual dan sosial umat beragama. Keberadaannya tidak hanya sebagai lokasi pelaksanaan ritual, tetapi juga sebagai pusat pembentukan identitas kolektif, internalisasi nilai-nilai moral, serta penguatan solidaritas komunitas. Dalam kehidupan masyarakat yang religius seperti Indonesia, tempat ibadah menjadi ruang yang merepresentasikan nilai keadilan, kebersamaan, dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Dalam perspektif hak asasi manusia, partisipasi dalam kehidupan keagamaan merupakan bagian dari kebebasan beragama yang dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 29 serta berbagai instrumen internasional. Hak untuk beribadah tidak hanya mencakup kebebasan menjalankan ritual, tetapi juga hak untuk mengakses ruang ibadah secara setara dan bermakna. Dengan demikian, aksesibilitas tempat ibadah merupakan bagian integral dari pemenuhan hak dasar warga negara (hamid, 2025).

Urgensi persoalan ini semakin nyata apabila merujuk pada laporan *World Health Organization* (WHO, 2025) yang menyebutkan bahwa sekitar lebih dari 1,3 miliar penduduk dunia hidup dengan kondisi disabilitas, setara dengan sekitar 16% populasi global. Kelompok ini cenderung menghadapi risiko kerentanan kesehatan, diskriminasi sosial, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, termasuk layanan promotif preventif dan intervensi rehabilitasi. WHO menekankan bahwa ketimpangan kesehatan dan akses layanan terjadi bukan semata karena kondisi medis, tetapi akibat hambatan lingkungan, stigma, serta sistem sosial yang belum menerapkan desain universal dan layanan adaptif pada tingkat komunitas. Angka ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas bukan kelompok kecil yang terpisah dari kehidupan sosial, melainkan bagian signifikan dari struktur masyarakat global. Oleh karena itu, penyediaan ruang ibadah yang inklusif bukan sekadar pilihan moral, tetapi kebutuhan struktural. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia

tercatat sebanyak 22,97 juta orang atau sekitar 8,5% dari total populasi Indonesia. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar hukum perlindungan hak, implementasi di ruang-ruang publik, termasuk tempat ibadah, masih menghadapi tantangan. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penelitian mulai menyoroti pentingnya penyediaan ruang publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam lingkungan keagamaan. (Hanjarwati, 2021). menunjukkan bahwa aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut akses sosial yang memungkinkan individu berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Pada konteks tempat ibadah, sejumlah lembaga keagamaan mulai melakukan penyesuaian fasilitas seperti jalur kursi roda, area khusus disabilitas, dan penataan ruang yang lebih ramah difabel. Upaya tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya inklusivitas dalam praktik pelayanan keagamaan.

Namun demikian, berbagai upaya tersebut pada umumnya masih berfokus pada aspek aksesibilitas fisik. Ketersediaan sarana fisik memang penting untuk membuka akses masuk ke ruang ibadah, tetapi belum sepenuhnya menjamin partisipasi yang setara dalam aktivitas keagamaan. Aksesibilitas yang sesungguhnya juga mencakup dimensi komunikasi, informasi, dan keterlibatan aktif dalam proses peribadatan. Tanpa adanya akses komunikasi yang memadai, kehadiran fisik penyandang disabilitas di tempat ibadah belum tentu menghasilkan pengalaman spiritual yang bermakna. Oleh karena itu, konsep inklusivitas perlu dipahami secara lebih luas sebagai upaya menciptakan partisipasi penuh bagi seluruh umat tanpa terkecual (Hanjarwati, 2021).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika menyangkut dimensi komunikasi, khususnya bagi penyandang disabilitas pendengaran (Tuli). Praktik ibadah di banyak lembaga keagamaan masih didominasi komunikasi lisan melalui khotbah, doa, pembacaan kitab suci, dan nyanyian liturgis, Kondisi ini menyebabkan umat

Tuli sering mengalami hambatan dalam memahami pesan-pesan keagamaan yang disampaikan. (rahmi, 2022) menjelaskan bahwa keterbatasan akses terhadap bahasa isyarat dalam kegiatan ibadah berpotensi mengurangi pemahaman keagamaan serta membatasi partisipasi aktif penyandang Tuli dalam komunitas keagamaan. Hambatan komunikasi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga memengaruhi rasa memiliki (sense of belonging), keterlibatan sosial, dan pengalaman spiritual umat Tuli dalam kehidupan beragama. Selain itu, bahasa isyarat merupakan sarana komunikasi utama bagi banyak penyandang Tuli dalam memahami informasi dan membangun interaksi sosial. (Savitri, 2026) menegaskan bahwa bahasa isyarat memiliki peran strategis dalam menciptakan komunikasi yang inklusif dan mengurangi hambatan sosial yang dialami penyandang Tuli. Dalam konteks keagamaan, penyediaan akses bahasa isyarat menjadi kebutuhan penting agar umat Tuli dapat memahami pesan liturgi, mengikuti jalannya ibadah, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan komunitas iman. Dengan demikian, bahasa isyarat bukan sekadar alat bantu komunikasi, tetapi juga instrumen yang mendukung terwujudnya kesetaraan dalam kehidupan beragama.

Dalam tradisi Gereja Katolik, prinsip kesetaraan martabat manusia sebagai *imago Dei* menegaskan bahwa setiap umat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan liturgi. Liturgi dipahami bukan sekadar sebagai tindakan simbolik, melainkan sebagai perayaan iman bersama yang menuntut keterlibatan sadar dan penuh dari seluruh jemaat. Beberapa penelitian terbaru mengenai pastoral disabilitas menunjukkan adanya peningkatan kesadaran gereja terhadap pentingnya pelayanan inklusif, termasuk penyediaan juru bahasa isyarat dalam misa (Henriques, 2025) Hal tersebut menunjukkan respons pastoral yang positif terhadap kebutuhan umat Tuli. Akan tetapi, sebagian besar kajian masih berfokus pada dimensi teologis dan pendekatan pastoral, sementara aspek tata kelola organisasi, pembagian peran, koordinasi pelayanan, serta fungsi setiap unsur dalam penyelenggaraan pelayanan liturgi inklusif belum banyak dianalisis secara mendalam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Padahal, keberlanjutan pelayanan inklusif tidak hanya bergantung pada komitmen moral atau inisiatif individu, tetapi juga pada sistem tata kelola yang terstruktur. Integrasi layanan seperti juru bahasa isyarat dalam liturgi sering kali masih bersifat ad hoc dan bergantung pada momentum tertentu. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana struktur organisasi gereja, pembagian tugas antaraktor, koordinasi pelayanan, serta mekanisme kerja yang diterapkan mampu mendukung terwujudnya partisipasi liturgis yang setara bagi jemaat Tuli. Dengan demikian, terdapat celah akademik yang signifikan dalam kajian tentang pelayanan keagamaan yang ramah disabilitas, khususnya dalam memahami fungsi organisasi, pembagian peran, serta mekanisme pelayanan yang mendukung terwujudnya ibadah yang inklusif.

Meskipun persoalan pelayanan inklusif terjadi dalam berbagai tradisi keagamaan, setiap lembaga keagamaan memiliki karakteristik teologis dan struktur organisasi yang berbeda dalam merespons kebutuhan tersebut. Dalam konteks Gereja Katolik, struktur organisasi yang melibatkan pastor paroki, dewan pastoral, juru bahasa isyarat, serta tim liturgi menjadikan isu inklusivitas tidak hanya sebagai persoalan pastoral, tetapi juga sebagai persoalan pengelolaan pelayanan dan koordinasi antarunsur yang terlibat dalam penyelenggaraan liturgi. Oleh karena itu, analisis terhadap tata kelola pelayanan liturgi menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip kesetaraan yang diajarkan secara teologis benar-benar diterjemahkan ke dalam praktik organisatoris yang konkret dan berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena tersebut, Penelitian ini memfokuskan kajian pada tata kelola pelayanan liturgi inklusif bagi jemaat Tuli di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung dengan menganalisis bagaimana gereja beradaptasi terhadap kebutuhan jemaat Tuli, mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan pelayanan inklusif, membangun koordinasi antaraktor gerejawi, serta mempertahankan nilai-nilai kesetaraan dalam kehidupan liturgi. Gereja ini dipilih karena telah menghadirkan praktik pelayanan bahasa isyarat dalam perayaan liturgi, sehingga relevan untuk dianalisis dari perspektif struktural dan kelembagaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran dan fungsi struktur organisasi gerejawi dalam memastikan hak partisipasi liturgis secara setara.

Dari perspektif Studi Agama-Agama, penelitian ini juga memiliki relevansi konseptual. Kajian tentang agama dan disabilitas dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak menekankan pada dimensi teologis, spiritualitas, atau pengalaman keberagamaan individu. Sementara itu, analisis mengenai bagaimana organisasi keagamaan menjalankan fungsi pelayanan bagi kelompok difabel, khususnya jemaat Tuli, masih relatif terbatas. Padahal, institusi keagamaan memiliki peran signifikan dalam membentuk praktik sosial dan norma komunitas. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian agama yang tidak hanya normatif, tetapi juga struktural dan institusional.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian Studi Agama-Agama, khususnya dalam bidang agama dan disabilitas berbasis kelembagaan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran evaluatif mengenai model pelayanan liturgi inklusif yang telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi tantangan serta peluang pengembangannya. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar refleksi internal gereja dalam memperkuat sistem pelayanan yang lebih terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi tempat ibadah lain dalam mengembangkan praktik pelayanan keagamaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan umat difabel.

Dengan demikian, kajian mengenai tata kelola pelayanan liturgi inklusif bagi jemaat Tuli tidak hanya memiliki relevansi akademik, tetapi juga signifikansi sosial dan teologis. Penelitian ini berupaya menjembatani antara prinsip kesetaraan yang diajarkan secara normatif dengan praktik konkret dalam struktur organisasi gereja. Melalui analisis yang mendalam terhadap peran dan fungsi aktor-aktor gerejawi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sistem pelayanan liturgi inklusif dibangun melalui proses adaptasi terhadap kebutuhan jemaat Tuli, pencapaian tujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

pelayanan yang setara, integrasi antar unsur organisasi gereja, serta pemeliharaan nilai-nilai inklusivitas yang mendukung keberlanjutan pelayanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, Penulis merumuskan beberapa pertanyaan untuk menjaga agar pembahasan tetap terarah dan sesuai fokus penelitian, maka disusun beberapa rumusan masalah sebagai panduan analisis penelitian ini. Rumusan masalah tersebut meliputi:

1. Bagaimana struktur dan mekanisme tata kelola Gereja Katedral Santo Petrus Bandung dalam merancang dan menyediakan fasilitas liturgi bagi jemaat Tuli?
2. Apa saja peran dan fungsi masing-masing pihak (pastor, dewan paroki, juru bahasa isyarat, tim liturgi) dalam mengimplementasikan ibadah yang inklusif?
3. efektivitas dan tantangan dalam pengelolaan layanan liturgi inklusif bagi jemaat Tuli di gereja tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, kajian ini dikerjakan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis struktur dan mekanisme tata kelola Gereja Katedral Santo Petrus Bandung dalam merancang, mengatur, dan menyediakan fasilitas liturgi yang mendukung kebutuhan jemaat Tuli.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan peran serta fungsi setiap pihak yang terlibat, seperti pastor, dewan paroki, juru bahasa isyarat, dan tim liturgi, dalam pelaksanaan ibadah inklusif bagi jemaat Tuli.
3. Menilai efektivitas serta mengungkap tantangan yang muncul dalam pengelolaan pelayanan liturgi inklusif bagi jemaat Tuli, serta bagaimana gereja mengatasi hambatan tersebut untuk mewujudkan ibadah yang setara dan partisipatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari adanya hasil penelitian ini terbagi menjadi beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Studi Agama-Agama, khususnya dalam penguatan mata kuliah desain pelayanan keagamaan yang berorientasi pada perumusan model pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok difabel. Melalui analisis terhadap praktik pelayanan liturgi inklusif di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka konseptual mengenai bagaimana lembaga keagamaan merancang, mengelola, dan mengimplementasikan pelayanan yang adaptif, partisipatif, serta berkeadilan bagi jemaat Tuli.

Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai konsep inklusivitas dalam praktik keagamaan dengan menempatkan partisipasi liturgis sebagai bagian dari pemenuhan hak beragama yang bersifat substantif. Dengan mengkaji struktur organisasi, peran aktor, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam pelayanan liturgi inklusif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan teoritis bagi pengembangan desain pelayanan keagamaan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam mewujudkan praktik keagamaan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi pengelola Gereja Katedral Santo Petrus Bandung dalam mengembangkan sistem pelayanan liturgi yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan bagi jemaat Tuli. Temuan penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi praktik baik *(best practices)* sekaligus mengungkap berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah yang setara dan bermakna,

sehingga dapat menjadi dasar perbaikan dalam pengelolaan pelayanan keagamaan yang inklusif.

Lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang pelayanan keagamaan, seperti Kementerian Agama Republik Indonesia, serta lembaga non-pemerintah, organisasi keagamaan, dan pengelola tempat ibadah lintas agama dalam merumuskan kebijakan dan desain pelayanan keagamaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan model pelayanan yang tidak hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan nyata umat di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga relevansi praktis dalam mendukung transformasi tata kelola pelayanan keagamaan agar lebih responsif, adaptif, dan inklusif, sehingga ruang-ruang ibadah dapat menjadi lingkungan spiritual yang ramah, setara, dan terbuka bagi seluruh umat tanpa diskriminasi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dalam memahami bagaimana Gereja Katedral Santo Petrus Bandung mengelola dan menjalankan pelayanan liturgi inklusif bagi jemaat Tuli. Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritis utama, yaitu Teori Birokrasi dan Otoritas Max Weber sebagai grand theory serta Teori Fungsional Skema AGIL Talcott Parsons sebagai middle theory. Kedua teori ini dipilih karena memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan bagaimana suatu organisasi menjalankan fungsi dan pelayanannya melalui struktur yang terorganisasi, pembagian peran yang jelas, sistem kewenangan yang sah, serta mekanisme koordinasi yang mendukung pencapaian tujuan bersama. Melalui perspektif Weber, penelitian ini berupaya memahami bagaimana tata kelola organisasi gereja dibentuk melalui struktur kelembagaan, pembagian tugas, hierarki kewenangan, serta pola otoritas yang mendasari pengambilan keputusan dalam pelayanan liturgi inklusif. Sementara itu, Teori Fungsional Skema AGIL Talcott

Parsons digunakan untuk menjelaskan bagaimana Gereja Katedral Santo Petrus Bandung menjalankan fungsi-fungsi sosial dan organisasional yang diperlukan agar pelayanan bagi jemaat Tuli dapat berlangsung secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan memadukan kedua perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara struktur organisasi, pelaksanaan pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan spiritual jemaat Tuli dalam kehidupan liturgi gereja.

Teori birokrasi dan otoritas Max Weber digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan awal atau green teori untuk memahami bagaimana tata kelola Gereja Katedral Santo Petrus Bandung membentuk pelayanan liturgi inklusif bagi jemaat Tuli. Weber memandang birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling rasional, karena bekerja berdasarkan aturan formal, pembagian tugas yang jelas, struktur hierarkis, serta proses administrasi yang impersonal dan berorientasi pada profesionalitas (Weber, 1978). Selain itu, Weber menjelaskan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam suatu organisasi ditentukan oleh tiga tipe otoritas, yaitu otoritas tradisional, karismatik, dan rasional-legal (Luthfi, 2023). Kerangka ini membantu menganalisis bagaimana keputusan gereja mengenai penyediaan juru bahasa isyarat, penataan tempat duduk jemaat Tuli, serta regulasi pelaksanaan liturgi inklusif dibentuk dan dijalankan. Otoritas tradisional dapat terlihat apabila pelayanan dilakukan berdasarkan warisan dan aturan gerejawi; otoritas karismatik muncul ketika inisiatif pelayanan berasal dari figur pastor atau tokoh tertentu; sementara otoritas rasional-legal tampak ketika gereja mengatur inklusivitas melalui kebijakan dan prosedur formal paroki. Dengan demikian, teori Weber memungkinkan penelitian ini memahami bagaimana struktur birokratis, pola otoritas, serta spesialisasi peran seperti juru bahasa isyarat berkontribusi pada terbentuknya tata kelola liturgi yang responsif dan mendukung partisipasi penuh jemaat Tuli (Utari, 2025).

Selanjutnya, teori Fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons digunakan sebagai *middle theory* untuk menganalisis fungsi sistem sosial dalam praktik pelayanan liturgi inklusif. Parsons menjelaskan bahwa setiap sistem sosial

harus mampu memenuhi empat fungsi utama agar dapat bertahan dan berjalan secara efektif, yaitu Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latency (L)**.** Keempat fungsi tersebut merupakan prasyarat dasar yang saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan suatu sistem sosial, termasuk dalam konteks lembaga keagamaan (Nikma, 2025).

Fungsi Adaptation (A) merujuk pada kemampuan sistem dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan kebutuhan yang berkembang. Dalam konteks penelitian ini, gereja sebagai institusi keagamaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kebutuhan jemaat Tuli, seperti melalui penyediaan juru bahasa isyarat dan pengembangan bentuk komunikasi liturgi yang lebih inklusif. Selanjutnya, Goal Attainment (G) berkaitan dengan kemampuan sistem dalam menetapkan tujuan serta mencapainya. Hal ini tercermin dalam upaya gereja merumuskan tujuan pelayanan liturgi inklusif sebagai bagian dari pelayanan keagamaan yang setara dan berkeadilan. Fungsi berikutnya adalah Integration (I), yaitu kemampuan sistem dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai aktor yang terlibat agar dapat bekerja secara harmonis. Dalam praktik pelayanan liturgi inklusif, integrasi ini melibatkan kerja sama antara pastor, dewan paroki, tim liturgi, serta juru bahasa isyarat. Sementara itu, Latency (L) atau pemeliharaan pola mengacu pada kemampuan sistem dalam mempertahankan nilai, norma, dan budaya yang mendukung keberlangsungan sistem tersebut. Dalam konteks gereja, fungsi ini tercermin dalam internalisasi nilai-nilai inklusivitas, seperti kesetaraan dan penghargaan terhadap martabat manusia (Nikma, 2025)

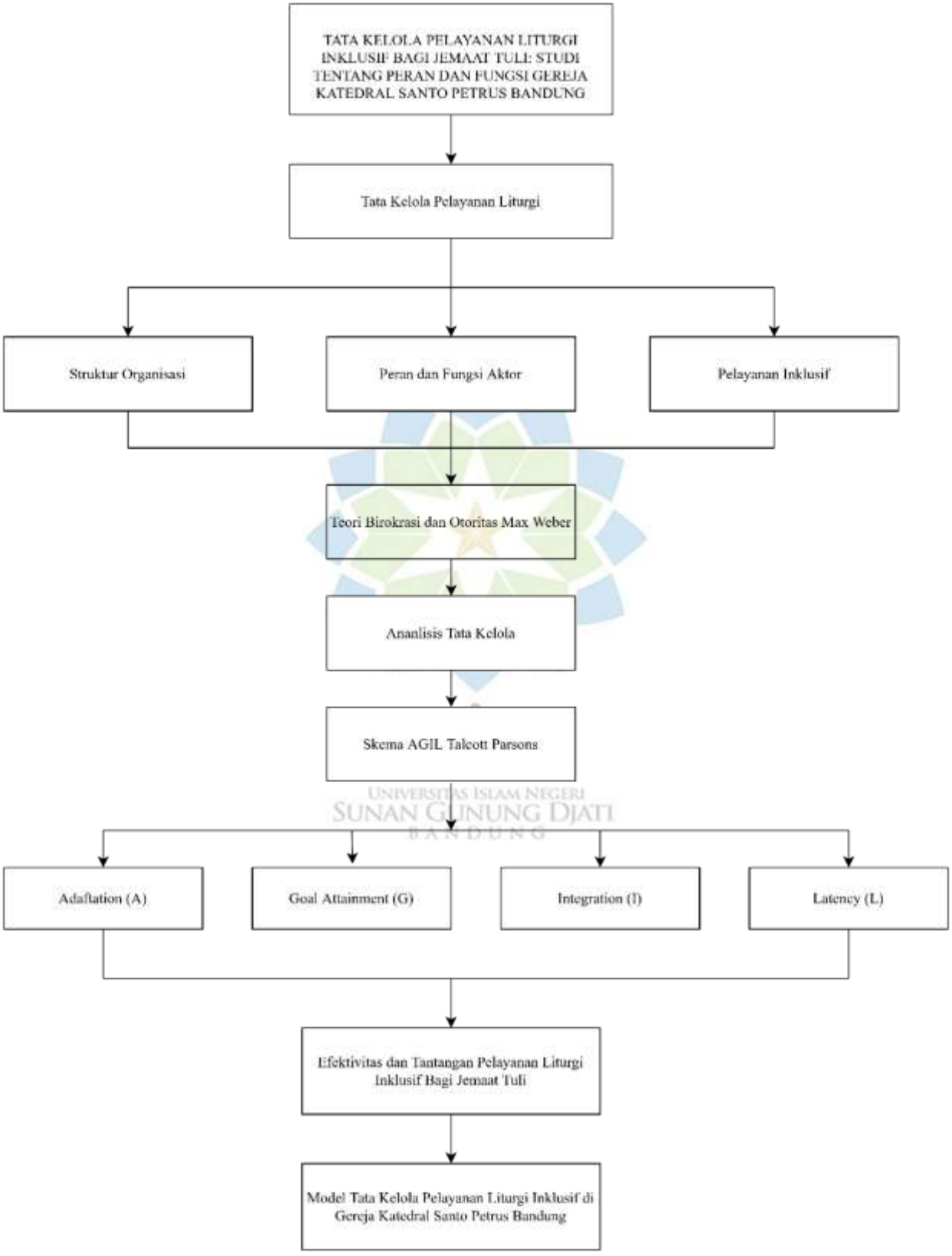
Dengan menggunakan kerangka AGIL, penelitian ini tidak hanya melihat struktur organisasi secara formal, tetapi juga memahami bagaimana sistem gereja berfungsi secara dinamis dalam praktik pelayanan keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi sejauh mana pelayanan liturgi inklusif mampu berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta mengungkap kemungkinan adanya disfungsi dalam salah satu aspek sistem sosial tersebut (Marlian, 2022)**.** Dengan demikian, teori AGIL memberikan landasan analitis yang

penting dalam memahami bagaimana pelayanan liturgi inklusif dapat diimplementasikan secara optimal dalam kehidupan gerejawi.

Secara keseluruhan, penggunaan teori birokrasi dan otoritas dari Max Weber sebagai *grand theory* serta teori Fungsional dari Talcott Parsons sebagai *middle theory* memberikan kerangka analisis yang saling melengkapi dalam penelitian ini. Teori Weber berperan dalam menjelaskan bagaimana struktur organisasi, pola otoritas, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam gereja membentuk tata kelola pelayanan liturgi, khususnya dalam merespons kebutuhan jemaat Tuli. Sementara itu, teori AGIL memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana sistem tersebut berfungsi secara dinamis melalui proses adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi aktor, serta pemeliharaan nilai-nilai inklusivitas dalam praktik pelayanan keagamaan.

Dengan mengombinasikan kedua teori tersebut, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek formal dan struktural kelembagaan, tetapi juga mampu mengungkap dimensi fungsional yang menentukan efektivitas dan keberlanjutan pelayanan liturgi inklusif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana tata kelola pelayanan keagamaan yang inklusif dapat diimplementasikan secara sistematis, sehingga mampu menghadirkan pengalaman ibadah yang setara, partisipatif, dan bermakna bagi jemaat Tuli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian, penulis perlu meninjau terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan referensi yang relevan guna memperkuat fokus penelitian. Langkah ini juga bertujuan untuk menghimpun informasi yang valid serta membandingkan temuan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dapat diidentifikasi perbedaan, celah penelitian, serta unsur kebaruan yang akan dikembangkan dalam kajian ini.

1. Artikel yang ditulis oleh Henriques, Nini, dan Unitly (2025) berjudul *"Pastoral Disabilitas dalam Gereja Katolik: Meninjau Tantangan dan Peluang Pelayanan Inklusif"* mengkaji bagaimana praktik pelayanan pastoral bagi penyandang disabilitas dijalankan dalam konteks Gereja Katolik. Penelitian ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi gereja, seperti keterbatasan fasilitas, minimnya sumber daya manusia yang terlatih, serta kurangnya pemahaman jemaat terhadap kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Di sisi lain, artikel ini juga mengidentifikasi peluang pengembangan pelayanan inklusif melalui penguatan komitmen pastoral, pembaruan pendekatan liturgi, serta peningkatan kesadaran gereja akan pentingnya penerimaan dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan menggereja. Temuan penelitian ini relevan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian mengenai tata kelola pelayanan liturgi inklusif di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung, khususnya dalam melihat bagaimana gereja Katolik merespons isu disabilitas melalui kebijakan, struktur pelayanan, dan praktik pastoral yang inklusif. (Henriques, 2025).
2. Artikel yang di tulis Khatarina Mey Kusuma dan Indrawati yang berjudul *"Aksesibilitas dan Fasilitas Umum bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Masjid Baitussalam Tangen Sragen"* mengkaji bagaimana masjid tersebut menyediakan fasilitas yang ramah bagi jamaah disabilitas fisik berdasarkan standar bangunan dan pedoman aksesibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa elemen aksesibilitas telah disediakan seperti jalur masuk khusus dan area ibadah yang relatif lapang implementasinya

belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Penyandang disabilitas fisik masih mengalami hambatan dalam mobilitas, seperti ramp yang terlalu curam, pegangan tangan yang tidak sesuai standar, serta fasilitas wudu yang belum mudah dijangkau. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas di rumah ibadah tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana fisik, tetapi juga pada sejauh mana standar pelayanan inklusif benar-benar diterapkan. Penelitian ini menjadi relevan sebagai pembanding bagi penelitian mengenai inklusivitas liturgi di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung, terutama dalam memahami bagaimana berbagai tempat ibadah menghadapi tantangan dalam menyediakan ruang ibadah yang ramah dan dapat diakses oleh umat disabilitas (Kusuma, 2024).

3. Artikel yang ditulis oleh Safitri dalam *Jurnal of Islamic Art and Architecture (JIAA)* membahas tentang aksesibilitas penyandang disabilitas di Masjid Agung Kalinyamat Pemalang. Penelitian ini menyoroti berbagai hambatan fisik yang dialami penyandang disabilitas ketika akan memasuki dan menggunakan fasilitas masjid, seperti akses jalan yang kurang ramah, ketiadaan ramp sesuai standar, keterbatasan ruang gerak di area wudu, serta belum tersedianya fasilitas penunjang seperti guiding block, toilet aksesibel, dan penanda visual. Safitri menunjukkan bahwa meskipun masjid telah berupaya meningkatkan kenyamanan jamaah, kebutuhan penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara optimal. Penelitian ini menegaskan pentingnya desain arsitektur inklusif dan penerapan prinsip *Universal Design* agar masjid dapat menjadi tempat ibadah yang ramah untuk semua kalangan. Temuan Safitri relevan bagi penelitian ini karena memberikan gambaran bahwa upaya menciptakan tempat ibadah inklusif masih menjadi tantangan di berbagai komunitas keagamaan, sehingga menegaskan urgensi pelayanan liturgi yang responsif terhadap kebutuhan jamaah difabel, termasuk jemaat Tuli di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung (Safitri et al., 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa kajian mengenai aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas di tempat ibadah sebagian besar berfokus pada aspek fisik, penyediaan fasilitas, serta pelayanan pastoral umum bagi difabel. Namun, berbagai penelitian tersebut masih menunjukkan bahwa implementasi pelayanan inklusif belum optimal dan sering menghadapi banyak keterbatasan. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa Gereja Katedral Santo Petrus Bandung telah mengembangkan bentuk pelayanan keagamaan yang lebih inklusif bagi jemaat disabilitas, khususnya jemaat Tuli, melalui penyediaan juru bahasa isyarat serta penataan liturgi yang mendukung partisipasi penuh. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana gereja mengelola pelayanan liturgi yang inklusif dan dapat menjadi model atau rujukan dalam menciptakan tempat ibadah yang ramah bagi penyandang disabilitas, terutama disabilitas Tuli.

G. Sistematika Penulisan

Agar tidak mempersulit pemahaman dan penyusunan, maka dengan begitu materi-materi yang akan di bahas dan di cantumkan lalu di kelompokan menjadi beberapa bagian sub dan bab, berikut ini laur penulisan yang akan di buat:

Bab Satu Pendahuluan : berfungsi sebagai fondasi bagi seluruh penelitian. Disini, peneliti akan memaparkan latar belakang permasalahan yang menjadi fokus kajian, menjelaskan mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti, dan merumuskan tujuan penelitian secara jelas. Selain itu, bab pendahuluan juga akan menyajikan tinjauan pustaka yang relevan untuk memberikan landasan teoretis bagi penelitian.

Bab Dua Tinjaun Pustaka: Tinjauan Pustaka, merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Di sini, peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk membangun landasan teori yang kokoh dan memberikan alasan yang kuat mengapa metode penelitian tertentu dipilih.

Bab Tiga Metode Penelitian : menjelaskan secara detail bagaimana penelitian ini dilakukan. Peneliti akan memaparkan secara rinci metode penelitian yang digunakan, baik itu menggunakan pendekatan kuantitatif (berdasarkan angka-angka), kualitatif (berdasarkan kata-kata), atau kombinasi keduanya. Pada penelitian ini akan berfokus pada satu pendekatan yakni kualitatif.

Bab Empat hasil Penelitian: bab ini akan membahas gambaran umum mengenai objek penelitian, memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai karakteristik, kondisi, dan konteks yang melingkupi objek yang menjadi fokus utama dalam penelitian.

Bab Lima kesimpulan dan Saran: Bab terakhir dalam penelitian ini akan berfokus pada kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data dan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ini akan merangkum 14 hasil-hasil utama yang ditemukan, serta memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti dan bagaimana hal tersebut dapat dijawab melalui penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG